

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
TAHUN 2024



**PEMERINTAH
KOTA SURABAYA**



DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	54
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	59
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
III. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	71
3.1. Telaahan terhadap RPJMD Kota Surabaya 2021-2026	71
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	74
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	77
V. Penutup.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Surabaya sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024.





Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Persiapan Penyusunan Renja Meliputi :
 - a. Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
 - c. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup :





- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Hasil perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan maksud dapat menjamin Rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan RKPD.





4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja





Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala Bappedalitbang. Verifikasi seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Bappedalitbang menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Inspektorat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69





Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah





Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat sampai Renja final dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Inspektorat serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023.

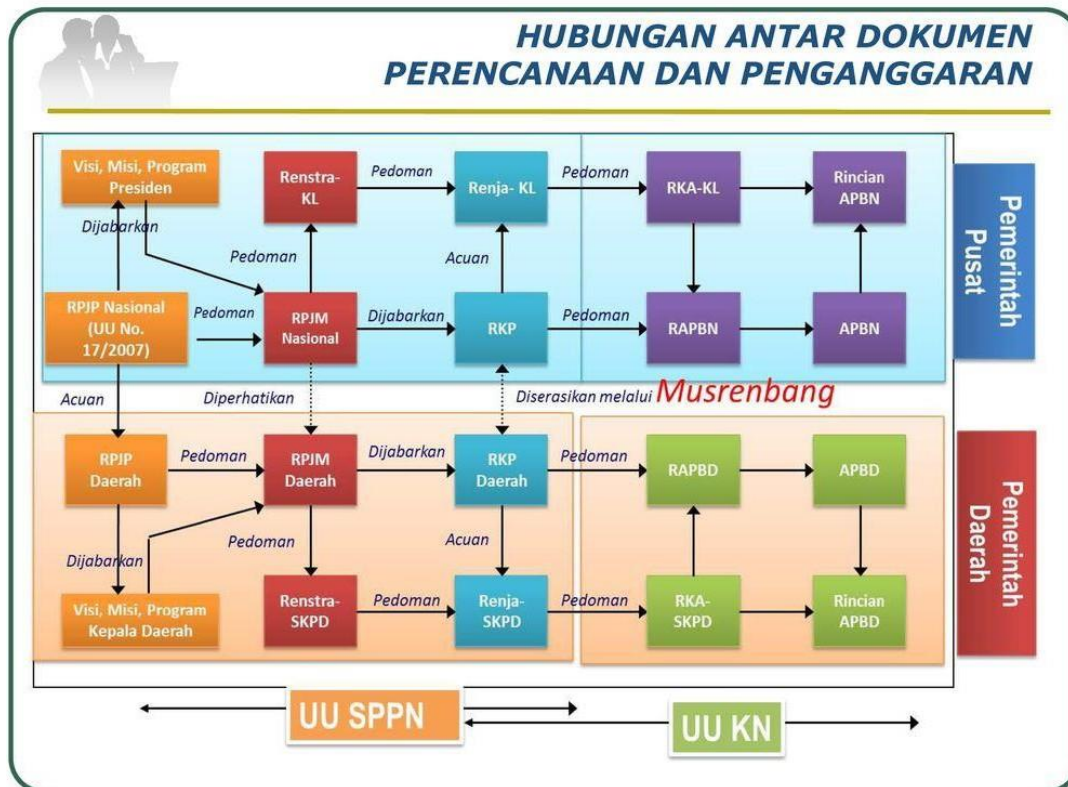
Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

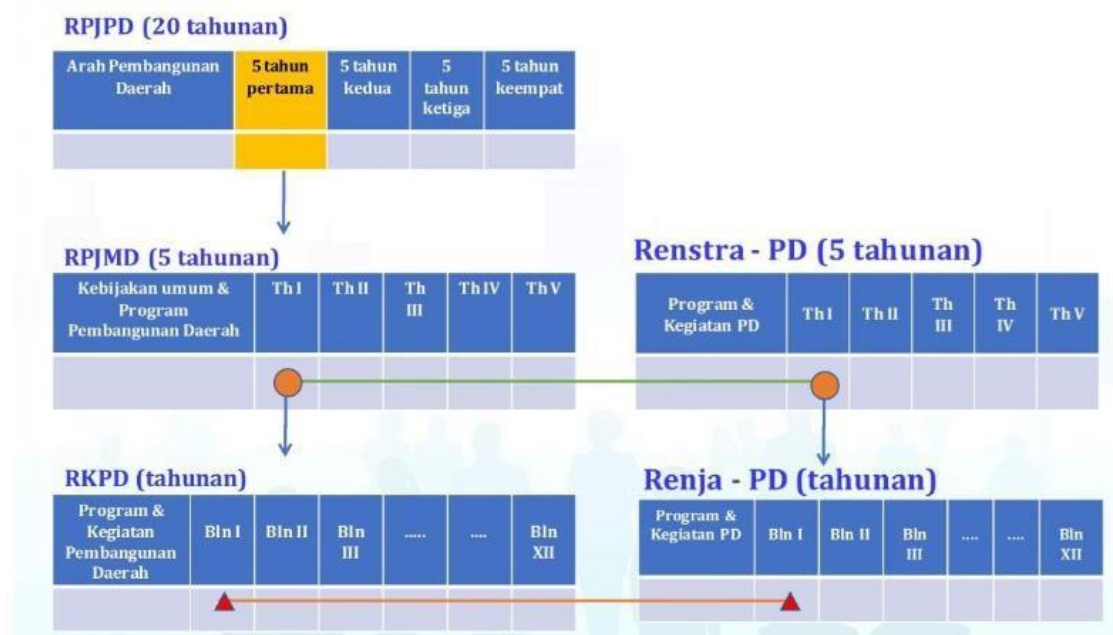
Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan 1.3.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.3
Keterkaitan Antar Rencana Pembangunan Daerah





1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 69).
 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.
 12. Keputusan Walikota No 188.45/267/436.1.2/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Inspektorat Kota Surabaya.
 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kinerja Inspektorat Kota Surabaya serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya.

Adapun tujuan disusunnya Renja PD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan bagi Perangkat Daerah (PD);
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Inspektorat melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kota Surabaya;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.





1.4. Sistematika Penulisan

Renja PD 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

III. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap RPJMD Kota Surabaya 2021-2026
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup





BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya. Sesuai dengan Peraturan Walikota di atas, tugas pokok Inspektorat Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dan dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Surabaya dilakukan dengan cara membandingkan data pada tahun sebelumnya, antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.



Pada bagian ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Kajian (*review*) Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan Tahun 2022 mencapai 92,81%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Target tahun 2022 sebanyak 100%. Realisasi tahun 2022 sebanyak 100%. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100,00%.



- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebesar 84,76%. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 84,76%.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Target Tahun 2022 yaitu 100%. Realisasi tahun 2022 sebanyak 84,76%. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 84,76%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja yang pertama Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi tahun 2022 mencapai 100%. Indikator yang kedua yaitu Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi dengan tingkat realisasi tahun 2022 mencapai 100%. Indikator yang ketiga yaitu Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu dengan tingkat realisasi tahun 2022 mencapai 100%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu. Target Tahun 2022 yaitu 20 Lembaga%. Realisasi tahun 2022 sebesar 24 Lembaga. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 120%.
 - 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan indikator kinerja Jumlah laporan penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Target Tahun 2022 yaitu 4 kali. Realisasi



tahun 2022 sebesar 4 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu. Target Tahun 2022 yaitu 20 Lembaga. Realisasi tahun 2022 sebesar 24 Lembaga. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 120%.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator kinerja yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan Target Tahun 2022 yaitu 20 Lembaga, Realisasi tahun 2022 sebesar 24 Lembaga, dan Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 120%. Indikator yang kedua yaitu Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev dengan Target Tahun 2022 yaitu 12 Rekomendasi, Realisasi tahun 2022 sebesar 14 Rekomendasi, dan Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 116.67 %. Indikator yang ketiga yaitu Jumlah dokumen hasil revidi laporan kinerja dan keuangan dengan Target Tahun 2022 yaitu 12 Dokumen, Realisasi tahun 2022 sebesar 17 Dokumen, dan Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 141.67 %.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi pelaksanaan pengawasan keuangan. Target Tahun 2022 yaitu 69 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 71 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 102,90%.

- 2) Sub Kegiatan Revidi Laporan Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi revidi laporan kinerja. Target Tahun 2022 yaitu 10 kali.



Realisasi tahun 2022 sebesar 10 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi reviu laporan keuangan. Target Tahun 2022 yaitu 5 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 7 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 140%.

4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator kinerja Jumlah lembaga atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang dimonitoring. Target Tahun 2022 yaitu 60 Lembaga. Realisasi tahun 2022 sebesar 70 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 116,67%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan indikator kinerja yang pertama Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti dengan tingkat realisasi tahun 2022 mencapai 100%. Indikator yang kedua yaitu Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah dengan tingkat realisasi tahun 2022 mencapai 100%. Indikator yang ketiga yaitu Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi dengan tingkat realisasi tahun 2022 mencapai 100%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Tahun 2022 yaitu



60 Lembaga, Realisasi tahun 2022 sebesar 60 Lembaga, dan Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%. Indikator yang kedua Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas dengan Target Tahun 2022 yaitu 60 Lembaga, Realisasi tahun 2022 sebesar 60 Lembaga, dan Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

- 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah. Target Tahun 2022 yaitu 60 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 60 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Target Tahun 2022 yaitu 20 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 21 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 105%.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Target Tahun 2022 yaitu 48 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 50 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 104.17%.
- 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi Pendampingan,



Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Target Tahun 2022 yaitu 12 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 12 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan dengan Target Tahun 2022 yaitu 4 dokumen, Realisasi tahun 2022 sebesar 7 dokumen, dan Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 175%.

1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan. Target Tahun 2022 yaitu 4 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 4 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Target Tahun 2022 yaitu 4 kali. Realisasi tahun 2022 sebesar 4 kali. Persentase realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.2.





Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
(Tabel T-C.29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouipu)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Peangkat Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian target Renstra Peangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Peangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Peangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	N/A	100%	92.8117%	92.81 %	100%		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	100 %	100 %	100 %	100.00 %	N/A		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						42 Orang/bulan		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat									



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



	Dae'iah									
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--





RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peningkatan Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Rencana Peningkatan Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Peningkatan Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Peningkatan daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Peningkatan Daerah tahun 2022	Persentase Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Persentase Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	N/A		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 Paket		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	100 %	84.76 %	84.76 %	100 %		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	100 %	84.76 %	84.76 %	N/A		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouipu)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pelempkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Rencana Pelempkat Daerah tahun 2023)	Pelempkaan Realisasi Capaian Target Rencana Pelempkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Pelempkat daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Pelempkat Daerah tahun 2022	Persentase Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Persentase Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Pelempkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
		Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu									
		Jumlah Pelempkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	N/A	N/A	20 lembaga	24 lembaga	120.00 %	20 lembaga		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kelempkaan Negaia/Delempkah									
		Jumlah laporan penanganan penyelesaian Kelempkaan Negaia/Delempkah	N/A	N/A	4 Kali	4 Kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kelempkaan Negaia/Delempkah yang Ditangani						5 Laporan		
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan tujuan									



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



	leikutu									
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--





RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peningkatan Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Rencana Peningkatan Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Peningkatan Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Peningkatan daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Peningkatan Daerah tahun 2022	Persentase Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Persentase Capaian Realisasi target rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah frekuensi pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	N/A	N/A	20 kali	24 kali	120.00 %	N/A		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan tertentu						20 Laporan		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
		Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	N/A	N/A	69 lembaga	69 lembaga	100.00 %	65 lembaga		
		Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan movev	N/A	N/A	12 Rekomendasi	14 Rekomendasi	116.67 %	200 Rekomendasi		
		Jumlah dokumen hasil review laporan kinerja dan keuangan	N/A	N/A	12 Dokumen	17 Dokumen	141.67 %	17 Dokumen		
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
		Jumlah frekuensi pelaksanaan pengawasan keuangan	N/A	N/A	69 Kali	71 Kali	102.90 %	N/A		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						65 Laporan		



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

6.01.02.2.01.03	Reviu Lapóran Kinefja									
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouipui)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peningkatan Daerah) tahun 2024	Realisasi Target KinerjaHasil programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2021	Target dan Realisasi Kinerja program danKegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana Peningkatan Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi CapaianTarget Rencana Peningkatan Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Peningkatan daerah tahun2022	Realisasi Rencana Peningkatan Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi i(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah frekuensi review laporan kinerja	N/A	N/A	10 Kali	10 Kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja						10 Laporan		
6.01.02.2.01.04	Review Laporan Keuangan									
		Jumlah frekuensi review laporan keuangan	N/A	N/A	5 Kali	7 Kali	140.00 %	N/A		
		Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan						7 Laporan		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Lanjutan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Lanjutan Hasil Pemeriksaan APIP									
		Jumlah lembaga atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI danInspektorat Kota Surabaya yang dimonitoring	N/A	N/A	60 Lembaga	70 Lembaga	116.67 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lanjutan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Lanjutan Hasil Pemeriksaan APIP						200 Dokumen		



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASIS ¹ ENSI									
		Persentase rumusan kebijakan bidang	N/A	N/A	100%	100%	100.00 %	N/A		





RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouipui)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pelelangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Rencana Pelelangkat Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Pelelangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Pelelangkat daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Pelelangkat Daerah tahun 2022	Persentase Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Persentase Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pengawasan yang ditindaklanjuti								
		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait informasi birokrasi	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi									
		Jumlah Pelelangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00 %	N/A		
		Jumlah Pelelangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	N/A	N/A	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00 %	N/A		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



		Jumlah frekuensi pendampingan dan	N/A	N/A	60 Kali	60 Kali	100.00 %	N/A		
--	--	-----------------------------------	-----	-----	---------	---------	----------	-----	--	--





RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pelempang Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Rencana Pelempang Daerah tahun 2023)	Pelempangan Realisasi Capaian Target Rencana Pelempang Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Pelempang Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Pelempang Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		asistensi Pelempang Daerah								
		Jumlah Pelempang Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						65 pelempang daerah		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
		Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	20 Kali	21 Kali	105.00 %	N/A		
		Jumlah Pelempang Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						10 pelempang daerah		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



		Jumlah frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	N/A	N/A	48 Kali	50 Kali	104.17 %	N/A		
--	--	---	-----	-----	---------	---------	-------------	-----	--	--





RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouipui)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peningkatan Daerah) tahun 2024	Realisasi Target KinerjaHasil programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2021	Target dan Realisasi Kinerja program danKegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana Peningkatan Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi CapaianTarget Rencana Peningkatan Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Peningkatan daerah tahun2022	Realisasi Rencana Peningkatan Daerah tahun 2022	Persentase Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Persentase Capaian Realisasi target rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						25 Kegiatan		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
		Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	N/A	N/A	12 Kali	12 Kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Peningkatan Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						8 peningkatan daerah		
6.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan teknis di BidangPengawasan dan Fasilitas Pengawasan									
		Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang diformulasikan	N/A	N/A	4 dokumen	7 dokumen	175.00 %	4 dokumen		
6.01.03.2.01.01	Pelaksanaan Kebijakan teknis di BidangPengawasan									



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

		Jumlah frekuensi Kebijakan teknis di	N/A	N/A	4 kali	4 kali	100.00 %	N/A		
--	--	---	-----	-----	--------	--------	-------------	-----	--	--



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes) / Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peningkatan Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Rencana Peningkatan Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Peningkatan Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana Peningkatan daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Peningkatan Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		bidang pengawasan yang diumumkan								
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun						4 Rekomendasi		
6.01.03.2.01.02	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan									
		Jumlah frekuensi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	N/A	N/A	4 kali	4 kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun						4 Rekomendasi		



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, di tabel 2.2 sebagai berikut :





RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Surabaya

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Indikator Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan : Meningkatkan tatakelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	✓	N/A	62%	64%	66%	N/A	N/A	74.07%	82.92%	85.98%	N/A	N/A	119.47%	129.56%	130.27%	N/A	N/A
	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	N/A	✓	N/A	90.84%	91.53%	91.96%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A	110.08%	109.25%	108.74%	N/A	N/A
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	✓	N/A	76%	77%	78%	N/A	N/A	75.60%	83.58%	86.68%	N/A	N/A	99.47%	108.55%	111.13%	N/A	N/A
Sasaran : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada <i>Operational Plan</i>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi dan Tugas Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Indikator Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Perencanaan strategis dan/atau sektoral																		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelembagaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelembagaan Daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelembagaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	17 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
Sasaran : Mengelola sasaran dan pelayanan serta administrasi pelembagaan pelembagaan daerah	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	99.73%	100%	100.00%	N/A	N/A	99.73%	100%	100.00%	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	72%	74%	76%	N/A	N/A	76.56 %	83.81%	86.27%	N/A	N/A	106.33%	113.26%	113.51%	N/A	N/A
Kegiatan : Penyediaan Baiaang dan Jasa Perkantoran Pelembagaan Daerah	Jumlah Jenis Baiaang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	12 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	12 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Penyediaan Baiaang dan Jasa Perkantoran Pelembagaan Daerah	Persentase ketersediaan baiaang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	199.52 %	N/A	N/A	N/A	N/A	199.52 %	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Penyediaan Baiaang dan Jasa Perkantoran Pelembagaan Daerah	Persentase ketersediaan baiaang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
Program Pembangunan dan Pengelolaan Saiaana dan Piasaiaana kedinasan	Persentase saiaana dan piasaiaana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	99.46 %	100%	100.00%	N/A	N/A	99.46%	100%	100%	N/A	N/A
Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah unit saiaana dan piasaiaana	N/A	N/A	N/A	27 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	27 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sarana dan Prasarana Pelembagaan	pelembagaan yang dikelola																		
Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Pelembagaan	Jumlah unit sarana pelembagaan yang dipelihara dan diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	239 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	189 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	79.08%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Pelembagaan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana pelembagaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Angka pelanggaran disiplin aparatur per 1.000 pegawai	N/A	✓	N/A	1.37	1.32	1.26	N/A	N/A	1.890	1.140	1.140	N/A	N/A	124.88%	113.37%	109.25%	N/A	N/A
	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil dituntaskan	N/A	✓	N/A	6.1%	9.1%	11.7%	N/A	N/A	6.60%	31.98%	26.40%	N/A	N/A	108.18%	351.43%	225.61%	N/A	N/A
Sasaran : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan tata kelola	Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur	N/A	N/A	N/A	90%	85%	80%	N/A	N/A	91.00%	111.11%	31.25%	N/A	N/A	98.89%	69.28%	160.94%	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
keuangan yang baik																			
	Persentase Penanganan Pengaduan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A
	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A
	Persentase penanganan disiplin aparat wilayah III	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A
	Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A
	Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A
	Persentase penanganan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	tata kelola administrasi keuangan wilayah III																		
Kegiatan : Evaluasi SAKIPSKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIPSKPD	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Inventarisasi Pemenuhan Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi temuan hasil pengawasan	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Suabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Suabaya	N/A	N/A	N/A	16 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	19 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	118.75%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Suabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Suabaya	N/A	N/A	N/A	16 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	17 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	106.25%	N/A	N/A	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	16 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	16 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspeksi Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	16 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	16 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspeksi Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspeksi Pembantu Wilayah I Di Lingkungan	N/A	N/A	N/A	85 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	80 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	94.12%	N/A	N/A	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemerintah Kota Surabaya																		
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	85 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	78 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	91.76%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	85 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	80 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	94.12%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	85 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	56 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	65.88%	N/A	N/A	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya																		
Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pelembagaan	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Dokumen Pelembagaan Inspektorat	N/A	N/A	N/A	14 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	14 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	21 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	116.67%	N/A	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan : Evaluasi SAKIPSKPD	Jumlah PD yang dievaluasi LKj-nya	N/A	N/A	N/A	N/A	72 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	72 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Inventarisasi Pemenuhan Pengawasan	Jumlah PD dan Sekolah yang dilakukan Inventarisasi Pemenuhan Pengawasan	N/A	N/A	N/A	N/A	140 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	143 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	102.14%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	22 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	122.22%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	19 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	105.56%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan	Jumlah lembaga yang	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	44 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	125.71%	N/A	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah III																		
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pengaduan Pada dan Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV																		
Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah aparat yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	N/A	N/A	30 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	31 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	103.33%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Pelembagaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	111.11%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Review Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen laporan kinerja tingkat kota yang direview	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
Kegiatan : Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Indikator	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Lanjutan Hasil Pengawasan	tindak lanjut hasil pengawasan																		
Kegiatan : Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
Kegiatan : Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
Kegiatan : Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
Kegiatan : Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
Kegiatan : Reviu Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah PD yang dilakukan reviu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	penganggaran dan pelaporan kinerja																		
Kegiatan : Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
Kegiatan : Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
Kegiatan : Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
Kegiatan : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	46 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	92.00%	N/A	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi dan Tugas Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan : Reviu Dokumen Pelembagaan Tingkat Kota	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang direviu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	200.00 %	N/A	N/A
Kegiatan : Suvey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan Suvey Penilaian Integritas (SPI)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	>70-80	>80-90	N/A	N/A	N/A	76.94	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
Sasaran : Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi pelembagaan di Pelembagaan Daerah Pemerintahan Kota Sulaibaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
Program Pelayanan Administrasi Pelembagaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pelembagaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,00 %	88,00 %	N/A	N/A	N/A	87.96%	88.7%	N/A	N/A	N/A	101.1%	100.8%
Kegiatan : Penyediaan	Persentase ketersediaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100 %



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Bidang dan Jasa Pelembagaan Pelembagaan Daerah	bidang dan jasa pelembagaan																		
Piogram Pembangunan dan Pengelolaan Saia dan Piasaia Kedinasan	Peisentase ketepatan pemenuhan saia dan piasaia pelembagaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	100 %
	Peisentase saia dan piasaia pelembagaan dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	100 %
Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Saia Pelembagaan	Peisentase pemeliharaan dan pengadaan saia pelembagaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100.00%	100 %
Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Peisentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	98,00%	98,00%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	102.04%	N/A
Sasaran : Jejaganya kesesuaian muatan perencanaan pembangunan	Peisentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	pada opsplan di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya																		
Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perisentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	100 %
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100 %
Kegiatan : Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen laporan kinerja tingkat kota yang direviu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100 %
Tujuan : Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Perisentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	14,20%	16,80%	N/A	N/A	N/A	31.98%	N/A	N/A	N/A	N/A	225.21%	N/A



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembaga Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	sama yang berhasil ditunjukkan																		
		N/A	N/A	N/A															
Sasaran : terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan tata kelola keuangan yang baik	Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	70%	N/A	N/A	N/A	53.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	128.74%	N/A
	Persentase Penanganan Pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
Program Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Persentase Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	165%	100.84%	N/A	N/A	N/A	165%	100.84%
Kegiatan : Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Indikator Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00%



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

Kegiatan : Peningkatan Kapabilitas Apaíat Pengawasan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 kali	50 kali	N/A	N/A	N/A	58 kali	50 kali	N/A	N/A	N/A	116.00 %	100.00%
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------	-----	-----	-----	---------	---------	-----	-----	-----	-------------	---------



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
InteIn Pemeintah (APIP)																			
Kegiatan : Suivey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Lapoian Suivey Penilaian Integritas (SPI)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Lapoian	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Lapoian	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A
Piogram Peningkatan Sistem Pengawasan InteInal Wilayah I	Peisentase penanganan disiplin apaiaatu wilayah I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	133.33%	100%	N/A	N/A	N/A	133.33%	100%
	Peisentase penanganan tata kelola administiasi keuangan wilayah I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
Kegiatan : Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektuat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	44 lembaga	48 lembaga	N/A	N/A	N/A	125.71 %	137.14%
Kegiatan : Reviu Pengangaian dan Pelapoian Kineja pada Inspektui Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu pengangaian dan pelapoian kineja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	19 lembaga	N/A	N/A	N/A	100.00 %	105.56%



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

Program Peningkatan	Persentase penanganan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	200%	100%	N/A	N/A	N/A	200%	100%
--------------------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	------	------



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi dan Tugas Pelembagaan Daerah	Indikator NSP K	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	disiplin aparatur wilayah II																		
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
Kegiatan : Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	45 lembaga	48 lembaga	N/A	N/A	N/A	128.57 %	137.14%
Kegiatan : Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	32 lembaga	19 lembaga	N/A	N/A	N/A	177.78 %	105.56%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	266.67%	100%	N/A	N/A	N/A	266.67%	100%
	Persentase penanganan tata kelola administrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator NSPK	Indikator IKK	Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	keuangan wilayah III																		
Kegiatan : Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektoriat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	39 lembaga	48 lembaga	N/A	N/A	N/A	111.43 %	137.14%
Kegiatan : Reviu Pengangaian dan Pelaporan Kinerja pada Inspektu Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu pengangaian dan pelaporan kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	19 lembaga	19 lembaga	N/A	N/A	N/A	105.56 %	105.56%
Piogram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Peisentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	128.57%	100%	N/A	N/A	N/A	128.57%	100%
	Peisentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
Kegiatan : Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektu	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	35 lembaga	N/A	N/A	N/A	35 lembaga	48 lembaga	N/A	N/A	N/A	100.00 %	137.14%



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Pelembagaan Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pembantu Wilayah IV	penanganan pengaduan																		
Kegiatan : Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	18 lembaga	N/A	N/A	N/A	18 lembaga	19 lembaga	N/A	N/A	N/A	100.00%	105.56%



Dari Tabel 2.2 di atas, pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat dari tahun 2017-2021 dapat diketahui bahwa sebagian besar realisasinya telah memenuhi dan/atau melebihi target. Terdapat beberapa indikator yang realisasinya kurang memenuhi target, di antaranya:

- a. Indikator Tujuan “Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan” pada tahun 2017 capaiannya 99,47%;
- b. Indikator Sasaran “Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah” tahun 2017 capaiannya 99,73%;
- c. Indikator Program “Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah” tahun 2017 capaiannya 99,46%;
- d. Indikator Program “Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan” tahun 2018 capaiannya 79,08%;
- e. Indikator Sasaran “Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur” pada tahun 2017 capaiannya 98,89% dan tahun 2018 capaiannya 69,28%;
- f. Indikator Kegiatan “Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya” tahun 2017 capaiannya 94,12%;
- g. Indikator Kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya” tahun 2017 capaiannya 91,76%;





- h. Indikator Kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya” tahun 2017 capaiannya 94,12%;
- i. Indikator Kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya” tahun 2017 capaiannya 65,88%;
- j. Indikator Kegiatan “Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP” tahun 2019 capaiannya 92%;

10 indikator di atas yang kurang memenuhi target menjadi bahan evaluasi untuk lima tahun mendatang agar kinerja pelayanan Inspektorat menjadi lebih optimal. Dari 10 indikator di atas, 4 di antaranya terkait pelayanan kesekretariatan, 1 di antaranya terkait pelanggaran hukum dan disiplin aparatur, 4 di antaranya terkait pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penanganan pengaduan, serta 1 di antaranya terkait pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan untuk diperhatikan pada kinerja lima tahun mendatang.

Pada tahun 2020-2021, Kota Surabaya terdapat Perubahan RPJMD 2016-2021 sehingga terdapat indikator baru yang dijalankan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai bentuk penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD 2016-2021 Kota Surabaya.





2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Pelayanan Inspektorat Kota Surabaya tidak lepas dari berbagai tantangan dan adanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan tersebut. Analisis lingkungan eksternal menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Surabaya

Berikut adalah tantangan-tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Surabaya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
2. Pemahaman beberapa Perangkat Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masih adanya pelanggaran yang berulang terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata





ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat;

5. Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih;
6. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel;
7. Besarnya afirmasi dan tuntutan masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur terhadap reformasi birokrasi dan kualitas layanan publik;

Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Surabaya

Berikut adalah peluang-peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Surabaya :

1. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan intern;
2. Adanya akses TI (Teknologi Informasi) yang diberikan untuk mendukung kinerja Inspektorat;
3. Kesempatan diklat dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kompetensi auditor;
4. Join audit dalam bidang pengawasan dengan pihak eksternal;
5. Adanya MoU dengan APH terkait dengan penanganan kasus;
6. Dukungan kegiatan pengawasan oleh pihak eksternal;
7. Adanya kepastian penegakan sistem hukum perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta penegakan bebas korupsi





Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan dan sekaligus mencerminkan eskalasi isu penting di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Isu Strategis Inspektorat pada saat perumusan Renstra akan mendukung rumusan tujuan dan sasaran Inspektorat.

Pemerintahan daerah yang bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktik yang korup, kolusif dan nepotis. Pemerintahan bersih hanya dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum, akuntabel terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang profesional, dan berorientasi masa depan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah payung hukum yang menjadi dasar yang kuat dan menghilangkan keraguan dalam memberantas praktik penyimpangan tanpa pandang bulu. Peluang untuk melakukan kehendak Undang-Undang tersebut menjadi lebih besar dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pencegahan penyimpangan akan lebih maksimal dengan adanya prosedur yang ketat dan teratur. Untuk itu terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi faktor pendukung dalam memperbesar peluang pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 2004 akan mengurangi





masalah kerugian negara dan kewajiban penyetoran kepada negara yang disebabkan oleh kelalaian pemegang kas (bendahara). Karena undang-undang ini mewajibkan pengangkatan bendahara dalam jabatan fungsional, sehingga akan terjadi peningkatan pemahaman para bendahara terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Di samping itu seringnya pergantian pejabat bendahara akan bisa dikurangi.

Di samping perundang-undangan yang dapat memberikan dukungan, ada pula undang-undang yang memberikan tantangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tantangan penerapan aturan ini akan dialami pada tahap awal, tetapi pada akhirnya akan tetap berdampak positif terhadap kesempurnaan administrasi keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjawab isu-isu strategis terkait dengan pelayanan Inspektorat Kota Surabaya, maka Inspektorat Kota Surabaya perlu untuk melaksanakan pembinaan sebelum dilakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sehingga Perangkat Daerah memiliki pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan, Inspektorat Kota Surabaya perlu melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara bersamaan pada saat pemeriksaan reguler.

Dengan memahami peluang dan tantangan tersebut maka kesiapan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi yang





ditetapkan akan lebih mantap. Dan pada akhirnya pencapaian cita-cita tersebut akan dapat menunjukkan kecenderungan umum berupa:

- a. Menurunnya kasus yang merugikan Negara.
- b. Meningkatnya disiplin kepegawaian, administrasi, anggaran dan perpajakan.
- c. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur/tata kerja yang berlaku pada umumnya.
- d. Membaiknya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam aspek pembiayaan, prosedur dan jangka waktu pelayanan.

Dalam perspektif yang lebih sempit, berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat maka kondisi yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain:

- a. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi.
- b. Meningkatnya persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu.
- c. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah.
- d. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat.
- f. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi.



Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu di atasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Kota Surabaya di periode lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Surabaya di analisis dan dirumuskan melalui analisa SWOT Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ini, maka isu-isu strategis utama yang perlu Inspektorat Kota Surabaya sebagai PD dalam perumusan Renstra Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota antara lain:

1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.
3. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun reviu terhadap rancangan awal RKPD Inspektorat pada tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :





Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat
(Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOP		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	23,020,547,906	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOP		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	25,046,347,961	
	Administrasi Keuangan Peningkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	19,970,068,087	Administrasi Keuangan Peningkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	22,749,958,240	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	19,970,068,087	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	22,749,958,240	
	Administrasi Umum Peningkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	866,124,970	Administrasi Umum Peningkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	599,572,701	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	866,124,970	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	599,572,701	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,184,354,849	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,696,817,020	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,184,354,849	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,696,817,020	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100 %	2,088,811,040	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100 %	1,900,943,200	
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %				Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %		
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Pejabat Daerah	100 %				Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Pejabat Daerah	100 %		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah dokumen hasil review laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	1,313,855,200	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah dokumen hasil review laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	1,214,629,100	
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan movev	142 Rekomendasi				Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan movev	142 Rekomendasi		
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	60 lembaga				Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	60 lembaga		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	318,798,400	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	293,992,600	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

	Monitoring dan Evaluasi indak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan indak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi indak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan indak	142 Dokumen	357,460,000	Monitoring dan Evaluasi indak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan indak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi indak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan indak Lanjut	142 Dokumen	332,655,000	
--	---	-------------	--	----------------	-------------	---	-------------	---	----------------	-------------	--



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					Hasil Pemeriksaan APIP			
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	318,798,400	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	293,998,400	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	318,798,400	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	293,983,100	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pejabat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	774,955,840	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pejabat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	686,314,100	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	386,998,400	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	342,671,500	
	Penanganan Penyelesaian Keuangan Negeri/daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Keuangan Negeri/daerah yang Ditangani	5 Laporan	387,957,440	Penanganan Penyelesaian Keuangan Negeri/daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Keuangan Negeri/daerah yang Ditangani	5 Laporan	343,642,600	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait informasi birokrasi	100 %	1,959,190,400	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait informasi birokrasi	100 %	1,815,186,600	
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100 %				Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100 %		



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

			Peisentase íumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %				Peisentase íumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %		
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------	--	--



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang diumumkan	4 dokumen	687,796,800	Peumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang diumumkan	4 dokumen	623,608,200	
	Peumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	346,498,400	Peumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	313,743,000	
	Peumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	341,298,400	Peumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	309,865,200	
	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	45 Kali	1,271,393,600	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	45 Kali	1,191,578,400	
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan				Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Pejabat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 pejabat daerah	350,198,400	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Pejabat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 pejabat daerah	327,887,400	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Pemerintahan Daerah			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Peningkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 peningkatan daerah	306,198,400	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Peningkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 peningkatan daerah	287,897,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	274,998,400	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	267,097,000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Peningkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 peningkatan daerah	339,998,400	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Peningkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 peningkatan daerah	308,697,000	
TOTAL					27,068,549,346	TOTAL					28,762,477,761



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat

Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Surabaya menghasilkan saran dan masukan pada penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta penyelesaian permasalahan yang mendesak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Masukan yang ada tidak berupa usulan program atau kegiatan, akan tetapi penajaman terhadap bentuk pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah disusun pada rancangan awal Inspektorat. Saran dan Masukan pada Forum Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Dr. Ignatia Martha H., S.E., M.E., saran yang diberikan yaitu :

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan strategi berikut ini :

- a. Strategi Intensitas Pengawasan Reguler.
- b. Strategi Pengawasan Berbasis Risiko.





- c. Strategi Monitoring Pelaksanaan APBD.
- d. Strategi Intensitas Konsultatif.
- e. Strategi Intensitas Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- f. Strategi Intensitas Penyelesaian / Pelaksanaan Kesesuaian Akuntabilitas Pemerintah.
- g. Peningkatan penyelenggaraan kualitas pengawasan tidak lepas dari peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan dengan meningkatkan Kapasitas SDM dan Kapasitas Sarana Prasarana.
- h. Penyusunan sistem IT untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.
- i. Pembangunan zona integritas berupa Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

2. Emanuela Ruli Damayanti, S.E., M.A., saran yang diberikan yaitu :

- a. Apresiasi yang besar atas inovasi yang telah dilakukan. Jangan sampai terlalu fokus pada kuantitas, tapi juga harus melihat kontribusinya atas efisiensi tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat.
- b. Inovasi E-Audit harus memberikan kontribusi untuk meningkatkan *output* dan *outcome* kegiatan pengawasan Inspektorat serta harus *inline* dengan cascading perencanaan yang telah dibuat.
- c. Mohon reviu kembali perencanaan inspektorat terkait kegiatan Pendampingan Dan Asistensi karena *outcome* kegiatan tersebut terlihat tidak selaras dengan *output* atas Kegiatan yang diselenggarakan.





- d. Peraturan Walikota tentang Benturan Kepentingan harus dapat menjelaskan mekanisme pelaporan jika yang dilaporkan adalah bagian yang paling atas dari struktur organisasi.
 - e. Terkait manajemen risiko, harus ada mekanisme/pedoman yang detail untuk menghitung risiko seperti risiko awal, *inherent risk*, dan *residual risk*.
 - f. Peningkatan kompetensi Inspektorat perlu diperhatikan, apakah dengan e-audit dapat mengurangi jumlah SDM inspektorat yang kurang.
 - g. Harus ada dasar penetapan target *output* atas indikator yang ditetapkan.
 - h. Forum PD dapat menjadi wadah untuk menerima masukan dan evaluasi atas target yang ditetapkan.
3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, saran yang diberikan berupa :
- Mohon reviu terkait *output* atas 65 Lembaga karena jumlah OPD di Kota Surabaya tidak sebanyak itu.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, saran yang diberikan berupa :
- Mohon diperjelas petunjuk teknis perihal penilaian risiko.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, saran yang diberikan berupa :
- Mohon reviu ulang inovasi yang telah tercipta agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas.



6. Bagian Hukum dan Kerjasama, saran yang diberikan berupa :

Template dan Juknis agar lebih didetailkan.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, saran yang diberikan berupa :

Kegiatan pengawasan dapat dimaksimalkan dengan menu yang terkait dengan kegiatan prioritas.

2.5.2. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, Klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD kota di kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan



Pengembangan. Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD provinsi dan pejabat PD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

2.5.3. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat sebagai bagian dari Perangkat Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;





- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap RPJMD Kota Surabaya 2021-2026

Keterkaitan Visi dengan Misi Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1. Keterkaitan Visi dengan Misi Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan	Maju	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
	Humanis	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkualitas, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
	Berkelanjutan	Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, keutuhan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan
		Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
		Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dari uraian di atas, Inspektorat Kota Surabaya diamanahkan untuk mendukung ketercapaian Misi 4 yakni “Memantapkan transformasi birokrasi yang



bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik” sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Surabaya yang relevan untuk mendukung ketercapaian Misi 4 tersebut.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 melalui misi yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan misi 4 diuraikan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Misi 4 “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Tujuan dari misi tersebut, yaitu:

- a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan sasaran pembangunan:

- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan indikator:

- Nilai SAKIP
- Opini BPK
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif.

Dengan indikator:

- Nilai Kepuasan Masyarakat





Uraian indikator dan target tujuan dan sasaran Misi 4 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pencapaian tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi			78,13	81,81	82,61	83,41	84,21	85,01	85,81	85,81
		Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	75,13	81,00	81,92	82,97	84,02	85,07	86,12	86,12
				Opini BPK	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,05 %	88,31%	88,31%	89,23 %	90,16%	91,08%	92,01%	92,01%





3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Surabaya, Inspektorat Kota Surabaya diamanahkan untuk mendukung ketercapaian Misi 4 yakni “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik” sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Surabaya yang relevan untuk mendukung ketercapaian Misi 4 tersebut. Tujuan Kota dari misi tersebut, yaitu:

- a. “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif”, dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan sasaran pembangunan kota:

- “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Dengan indikator:

- Nilai SAKIP
- Opini BPK
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif”.

Dengan indikator:

- Nilai Kepuasan Masyarakat

Sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Surabaya diamanahkan untuk mendukung ketercapaian indikator sasaran kota “Nilai SAKIP”. Dalam “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur





Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah”, Inspektorat Kota Surabaya sesuai tugas dan fungsinya mengampu urusan:

- “Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan”. Dengan Bidang Urusan:
 - Inspektorat Daerah

Tujuan Inspektorat adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespons isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran Inspektorat merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sasaran Inspektorat disusun juga dengan memperhatikan rumusan permasalahan serta tugas dan fungsi utama Inspektorat. Berikut rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Surabaya untuk mewujudkan ketercapaian visi, misi, tujuan kota dan sasaran kota diuraikan dalam Tabel 3.3.





Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Surabaya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks kualitas pengawasan	79,23	81,60	83,55	85,93	87,88
1.1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	82.07	82.31	82.56	82.8	83.05
1.2	Meningkatkan kualitas pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang	32,2 %	40,68 %	47,46 %	55,93 %	62,71 %
		Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Peangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Peangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Peangkat Daerah	84.7	85.73	86.75	87.78	88.81



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program Inspektorat yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Penyusunan program Inspektorat dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD serta mengacu pada tujuan dan sasaran Inspektorat;
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Inspektorat.

Program berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Inspektorat merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Berikut perincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Kota Surabaya:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:

- 1) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah



- 2) Reviu Laporan Kinerja
- 3) Reviu Laporan Keuangan
- 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan:

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan.

Sub Kegiatan:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan:

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas





3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program, kegiatan, serta sub kegiatan di atas dirumuskan dengan indikator, target, dan pendanaan agar dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran PD. Untuk lebih jelasnya, indikator, target, serta pagu indikatif tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:





Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Kota Surabaya
(Tabel T-C.33)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	JNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		100 %	R p 25.046.347.961			100 %	Rp 30.533.139.166
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pejabat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	R p 22.749.958.240			100 %	Rp 26.894.766.262
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		42 Orang/bulan	Rp 22.749.958.240			42 Orang/bulan	Rp 26.894.766.262
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Pejabat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor		100 %	Rp 599.572.701			100 %	Rp 820.389.279
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	Rp 599.572.701			2 Paket	Rp 820.389.279
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	R p 1.696.817.020			100 %	Rp 2.817.983.625



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	Rp 1.696.817.020			12 Laporan	Rp 2.817.983.625
-----------------	--	-----------------------------------	--	------------	------------------	--	--	------------	------------------



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kod	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prioritas Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu Pengawasan internal yang ditindaklanjuti Peringkat Daerah		100 % 100 % 100 %	Rp 1.900.943.200			100 % 100 % 100 %	Rp 2.459.989.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil revidi laporan kinerja dan keuangan Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal		17 Dokumen 142 Rekomendasi 60 Lembaga	Rp 1.214.629.100			17 Dokumen 20 Rekomendasi 65 Lembaga	Rp 1.887.669.143
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		60 Laporan	Rp 293.992.600			65 Laporan	Rp 523.327.658
6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja		10 Laporan	Rp 293.998.400			10 Laporan	Rp 38.669.419



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Peningkatan Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		7 Laporan	293.983.100			7 Laporan	Rp 35.207.709
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Indak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Indak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Indak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Indak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		142 Dokumen	Rp 332.655.000			20 Dokumen	Rp 1.290.464.357
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Peningkatan Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu		20 Lembaga	Rp 686.314.100			20 Lembaga	Rp 572.319.857
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Keuangan Negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Keuangan Negara/daerah yang ditangani		5 Laporan	Rp 343.642.600			5 Laporan	Rp 34.869.702
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		20 Laporan	Rp 342.671.500			20 Laporan	Rp 537.450.155
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait efisiensi birokrasi		100 %	Rp 1.815.186.600			100 %	Rp 981.313.620
		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah		100 %				100 %	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

		Peísentase íumusan kebijakan bidang		100 %			100 %	
--	--	--	--	-------	--	--	-------	--



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kod	Ufusan / Bidang Ufusan Pemeintahan Daeiah danPogiam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikatoí Kineíja Pogiam/Kegiatan	Lokas	Rencana íahun 2024			Catata n Pentin g	Píakiíaan Maju Rencana íahun 2025	
				íaíget Capaian Kineíja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif	Sumbe íDana		íaíget Capaian Kineíja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(*)
e1	2	3	i4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.01	Peíumusan Kebijakan íeknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang diíumuskan		4 Dokumen	Rp 623.608.200			4 Dokumen	Rp 462.987.469
6.01.03.2.01.01	Peíumusan Kebijakan íeknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan íeknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		4 Rekomendasi	Rp 313.743.000			4 Rekomendasi	Rp 385.866.337
6.01.03.2.01.02	Peíumusan Kebijakan íeknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan íeknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun		4 Rekomendasi	Rp 309.865.200			4 Rekomendasi	Rp 77.121.132
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah írekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Refoímasi Bífokasi, Pembeíantasan Kofupsi dan Penegakan Integíitas		45 Kali	Rp 1.191.578.400			47 Kali	Rp 518.326.151
		Jumlah lapoían yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Ufusan Pemeintahan Daeiah		60 Lapoían				65 Lapoían	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Ufusan Pemeintahan Daeiah	Jumlah Peíangkat Daeiah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Ufusan Pemeintahan Daeiah		60 Peíangkat Daeiah	Rp 327.887.400			65 Peíangkat Daeiah	Rp 384.299.521



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Peangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		60 Peangkat Daerah	Rp 287.897.000			10 Peangkat Daerah	Rp 63.919.670
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		25 Kegiatan	Rp 267.097.000			25 Kegiatan	Rp 35.134.014
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Peangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		10 Peangkat Daerah	Rp 308.697.000			12 Peangkat Daerah	Rp 34.972.946
TOTAL					R p 28.762.477.761				Rp 33.974.441.786

*Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam prakiraan maju rencana th. 2025 mempertimbangkan prediksi inflasi dan prediksi kenaikan UMK.



BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Inspektorat pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2024. Dokumen Renja Inspektorat disempurnakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2023, tanggal 7 Agustus 2023 dan Perwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Renja Inspektorat Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 9 Agustus 2023

Inspektur
Kota Surabaya


RACHMAD BASARI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
196903231996021001